

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH TAHUN TERAKHIR  
REPELITA VI**

**Oleh:**

**Ginandjar Kartasasmita**

**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas**

**Disampaikan pada Pada Pembukaan Konasbang ke-15 Tahun 1997  
Jakarta, 27 Oktober 1997**

Konsultasi Nasional Pembangunan (Konasbang) tahun ini merupakan Konasbang yang ke-15 dan bertepatan dengan selesainya pemilihan umum dan terpilihnya wakil rakyat yang sekarang sedang bersidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Para wakil rakyat dalam Sidang Umum MPR yang sedang berlangsung akan merumuskan arahan pembangunan lima tahun mendatang.

Pada Konasbang ini, yang merupakan puncak dari rangkaian kegiatan proses pembangunan, kita akan berupaya menyeraskan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan serta menjaga keterpaduan antara aspirasi daerah, regional dan sektor. Wujud keserasian, keselarasan, keseimbangan dan keterpaduan tersebut harus tercermin, antara lain dalam usulan langkah-langkah kebijaksanaan, program/proyek pembangunan dan lingkup sumber pembiayaannya, serta perkiraan dampaknya terhadap sasaran-sasaran pembangunan, termasuk yang menyangkut aspek peningkatan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. Konasbang tahun ini juga berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran akhir REPELITA VI dan peletakan landasan untuk REPELITA VII. Oleh karena itu, Konasbang ini memiliki nilai strategis.

Pada pertengahan tahun kedua pelaksanaan Repelita VI diketahui bahwa ekonomi nasional ternyata telah tumbuh melampaui sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan, sehingga kita sesuaikan dari rata-rata 6,2 persen menjadi 7,1 persen per tahun. Antara tahun 1993-1995, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) propinsi telah mencapai rata-rata 7,67 persen per tahun. Struktur ekonomi nasional juga telah mengalami proses transformasi yang lebih jauh, yang dicirikan antara lain oleh pangsa sektor industri dalam produk domestik bruto (PDB) dewasa ini yang telah melampaui pangsa PDB sektor pertanian.

Namun pada tahun terakhir ini kita menghadapi berbagai hambatan yang akan berpengaruh pula pada tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Hambatan itu berupa gejolak mata uang dan bencana alam, kekeringan dan kebakaran hutan, yang sekarang masih berlangsung.

Persoalan kita adalah kondisi ekonomi nasional tidaklah homogen, artinya terdapat keragaman dan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Hal ini secara jelas dapat dilihat dari distribusi produk regional domestik bruto (PDRB) menurut wilayah. Pada tahun 1993, 16,8 persen dari total PDRB disumbangkan oleh kawasan timur Indonesia (KTI) dan 83,2 persen dari total PDRB nasional disumbangkan oleh kawasan barat Indonesia (KBI). Dari total PDRB tersebut, 60,8 persen merupakan sumbangan Jawa dan Bali dan 22,2 persen sumbangan Sumatera. Pada tahun 1995 keadaan itu sedikit membaik, dimana 17,1 persen dari total PDRB disumbangkan oleh KTI, dan 82,9 persen dari total PDRB nasional disumbangkan oleh KBI, meskipun sumbangan Jawa dan Bali masih meningkat sedikit menjadi sebesar 61,2 persen.

Hasil analisis yang dilakukan Bappenas menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan PDRB daerah meningkat. Namun demikian, diperkirakan terdapat beberapa propinsi yang tingkat pertumbuhannya akan menurun karena struktur ekonomi wilayah tersebut kurang siap menyesuaikan diri dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi. Disamping itu krisis moneter dan bencana kekeringan yang panjang juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional dan juga daerah, terutama yang mungkin akan sangat terpengaruh adalah propinsi-propinsi di Sumatera dan Kalimantan.

Jelas, kita tidak menghendaki pertumbuhan menjadi terlalu rendah dibandingkan dengan sasarannya. Oleh karena itu, kita harus berupaya keras agar perkiraan tersebut tidak menjadi kenyataan.

Oleh karena itu pula, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan perekonomian wilayah ke dalam perekonomian nasional sesuai dengan hirarki dan fungsinya masing-masing sehingga dicapai kesatuan ekonomi yang kukuh dan ketahanan ekonomi yang tangguh serta daya saing ekonomi yang tinggi.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut, kawasan andalan dan sektor-sektor unggulan yang dikembangkan di masing-masing propinsi, perlu mendapat perhatian khusus, juga dengan memanfaatkan kerjasama-kerjasama subregional dengan negara-negara tetangga. Untuk mendukung upaya tersebut, kita perlu lebih menggerakkan keikutsertaan dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif. Memang pada saat ini dunia usaha sedang terpukul karena dampak gejolak moneter, namun keadaan seperti ini tidak akan berlangsung terus, dan pada saatnya ekonomi kita akan pulih kembali. Kita harapkan setelah melalui masa yang sulit itu, ekonomi kita dan dunia usaha akan lebih tangguh lagi, akan lebih kuat lagi menahan guncangan. Dari pengalaman itu kita menjadi lebih arif dan memperoleh pelajaran yang berharga.

Pada saat seperti ini, justru kita harus mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita. Dalam hal ini antara lain adalah sektor-sektor yang tidak banyak terpengaruh oleh naiknya harga barang-barang impor tetapi justru mendapat keuntungan dari padanya. Di sini yang paling menonjol adalah sektor pertanian, terutama agroindustri dan agribisnis.

Agroindustri dan agribisnis haruslah kita dorong untuk mendorong proses industrialisasi di perdesaan, sekaligus penataan hubungan fungsional desa-kota. Hal ini sangat penting dan tidak boleh lengah dari perhatian kita mengingat proses industrialisasi hanya akan berkelanjutan apabila didukung oleh peningkatan produktivitas pertanian dengan memungkinkan nilai tambah proses produksi, distribusi dan pemasaran secara adil diterima oleh petani dan masyarakat perdesaan umumnya sehingga mampu mendukung pembangunan sektor industri dan jasa. Sebaliknya peningkatan produktivitas pertanian dan ekonomi perdesaan ini hanya akan terjadi apabila didukung oleh tumbuhnya budaya industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam masyarakat perdesaan.

Dalam kaitan itu, pengembangan kawasan andalan harus memperhatikan kesempatan berusaha dan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat. Pengembangan kawasan andalan yang berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan masyarakat dan lahan pertanian produktif perlu dicegah karena berdampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Ketahanan pangan wilayah (*regional food security*) merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan dan terus menerus dipelihara dan dimantapkan oleh kita semua.

Berbagai hal tadi saya harapkan dapat dibahas dalam Konasbang ini.

Secara khusus, Konasbang ini akan membahas persiapan penyusunan rencana investasi pemerintah dalam tahun anggaran 1998/99.

Dalam hubungan itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan:

*Pertama*, dalam upaya mengatasi krisis moneter kita berupaya untuk mengurangi pengeluaran pemerintah yang tidak meningkatkan kapasitas, nilai tambah dan tidak mengurangi kemiskinan. Di samping itu kita juga berusaha mengurangi dampak negatif dari berkurangnya kegiatan usaha masyarakat, terutama yang menggunakan komponen impor yang besar. Sebaliknya kita harus memanfaatkan krisis moneter tersebut, untuk mendorong kegiatan usaha yang mempunyai potensi ekspor. Mengingat ada kemungkinan anggaran pembangunan 1998/99 tidak bertambah, bahkan mungkin berkurang dibandingkan dengan 1997/98, maka semua investasi pemerintah tahun 1998/99 diarahkan agar lebih efisien dan efektif, sehingga penajaman prioritas menjadi amat penting.

*Kedua*, bencana alam kekeringan yang panjang dan kebakaran lahan telah mempengaruhi kinerja berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perhubungan. Oleh karena itu perhatian perlu lebih kita arahkan kepada upaya meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut dan berupaya untuk mengembangkan keterkaitannya dengan sektor industri dan perdagangan. Dalam kaitan ini, perlu diprioritaskan upaya untuk merehabilitasi pusat-pusat produksi yang rusak.

*Ketiga*, dalam upaya untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan perlu

diprioritaskan pengembangan peran usaha kecil dan menengah serta koperasi yang semakin mendalam dan meluas. Kinerja usaha kecil dan menengah serta koperasi tersebut akan menjadi sumber kekuatan daerah baik dalam mengatasi gejala moneter seperti yang sedang kita hadapi maupun dalam memantapkan ekonomi masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Sebagai penutup, saya mengharapkan agar peran KONASBANG sebagai mekanisme koordinasi perencanaan pembangunan yang paling akhir, muara dari semua proses perencanaan baik itu rencana sektor maupun rencana daerah, rencana investasi pemerintah maupun dunia usaha, serta rencana masyarakat secara umum, dapat lebih ditingkatkan. Oleh karena itu pemahaman dan penerapan SARLITA harus terus kita sempurnakan sebagai sarana untuk menterpadukan semua usaha pembangunan.

Untuk itu, hal pertama yang harus dihilangkan adalah sikap yang melihat Konasbang sebagai sesuatu yang sudah rutin adanya sehingga menjadi hal yang tidak penting. Sebaliknya, Konasbang harus kita manfaatkan untuk menghilangkan hambatan bagi terselenggaranya pembangunan yang terpadu, selaras, saling mendukung antarsektor dengan wilayah, antarwilayah dan antarsektor dalam satu wilayah. Kita harus berupaya keras agar hambatan-hambatan struktural terpecahkan. Kita harus pula mencari alternatif-alternatif perencanaan pembangunan yang mampu mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Akhir kata, kerjasama yang erat antar aparat daerah, antar instansi vertikal, dan dunia usaha serta masyarakat, merupakan syarat yang mendasar dalam rangka membangun keterpaduan rencana kebutuhan investasi, pengawasan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam Konasbang ini berbagai hal tersebut hendaknya dapat dibahas dan untuk selanjutnya dimantapkan penanganannya.